

**LAPORAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019**



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Alamat Jalan Jend. Ahmad Yani No. 9 , Telpon (0517) 21263 Faxes. (0517) 24525
Email : pmdhss@gmail.com
Kandangan 71211

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat diselesaikan dan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Kami menyadari bahwa laporan yang tersaji ini belum sesuai dengan yang diharapkan karena tidak semua indikator kinerja dapat dicapai sesuai yang diharapkan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selain melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) juga mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa baik yang dilaksanakan oleh SKPD terkait maupun yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Hal ini dalam rangka mempercepat pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran tentang kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 dan menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan di tahun selanjutnya.

Demikain laporan ini disajikan, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Kandangan, 31 Januari 2020



Dr. Kamidi, MIP
Pembina Tingkat I
NIP. 19731115 199302 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Umum	1
1.2. Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	4
2.1. Perencanaan Strategis	4
2.2. Indikator Kinerja Utama	7
2.3. Perjanjian Kinerja	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	10
3.2. Realisasi Anggaran	28
3.3. Prestasi yang pernah diraih	29
BAB IV PENUTUP	30
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator kinerja sasaran pada RPJMD 2018 – 2023 terkait pemberdayaan Masyarakat Desa	5
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Sasaran Starategis pada Rencana Startegis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 – 2023	7
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Dinas PMD Kabupaten Hulu Singai Sealtan Tahun 2019	8
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.....	9
Tabel 3.1	Capaian Nilai Predikat AKIP terhadap target Kinerja Tahun 2019	11
Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi Nilai AKIP Tahun 2018 di bandingkan Tahun 2023	11
Tabel 3.3	Pemenuhan Dokumen Keuangan Tahun 2019	13
Tabel 3.4	Pemenuhan Dokumen AKIP tahun 2019	13
Tabel 3.5	Nilai IDM dan Status Perkembangan desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019	15
Tabel 3.6	Rekapitulasi Tingakt Perkembangan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019	18
Tabel 3.7	Perkembangan Kategori Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017, 2018 dan 2019	18
Tabel 3.8	Capaian IDM terhadap Target Kinerja Tahun 2019..	19
Tabel 3.9	Capain Rata – rata IDM Tahun 2017, 2018 dan 2019	19
Tabel 3.10	Capaian Rata – rata IDM 2019 terhadap Target Akhir Renctra	20
Tabel 3.11	Perbandingan Capaian Status Desa Berdasarkan IDM di Kabupaten HSS dan Nasional Tahun 2019 ..	20

Tabel 3.12	Capaian Indikator Persentase Pemerintah Desa yang menggunakan Teknologi Informasi dalam Pemberian Pelayanan Tahun 2019	25
Tabel 3.13	Pemerintahan Desa yang menggunakan Teknologi Informasi dalam Pemberian Pelayanan Tahun 2018, 2019	26
Tabel 3.14	Capai JumlahPemerintah Desa yang menggunakan Teknologi Informasi dalam Pemberian Pelayanan di bandingkan dengan kondisi akhir Renstra Tahun 2023	26
Tabel 3.15	Realisasi Anggaran Program untuk pencapaian Target Kinerja Tahun 2019	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. UMUM

Laporan Kinerja ini dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan. Dalam Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 ini disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai Indikator Kinerja SKPD yang ditetapkan dalam Renja-SKPD.

Penyusunan Laporan Kinerja ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “good governance”. Disamping itu juga dalam rangka memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan Anggaran.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan posisi yang strategis bagi Desa. dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Salah satu dari nawacita Pemerintahan saat ini yaitu membangun dari pinggiran telah memposisikan Desa pada posisi yang strategis, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 yang menargetkan sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang berkelanjutan bagi pengentasan 5000 Desa Tertinggal dan peningkatan sedikitnya 2000 Desa Mandiri.

Dalam ruang lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memiliki 144 Desa, dimana muara dari setiap program dan kegiatan organisasi perangkat daerah dalam mendukung capaian visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, agamis dan produktif, semua menuju sasaran pada titik yang sama yaitu masyarakat Hulu Sungai Selatan yang tinggal di Desa-Desa dan Kelurahan. Dalam hal ini perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan organisasi perangkat

daerah sehingga dalam membangun masyarakat yang ada di desa bisa efektif dan efisien. Ini merupakan tantangan yang cukup besar bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok memberdayakan masyarakat dan desa untuk bisa mensinergikan program dan kegiatan pemberdayaan yang ada pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pada sisi yang lain Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul yang dimilikinya, Disamping itu dengan adanya Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Alokasi dana Desa dan sumber-sumber lain yang dikelola oleh Pemerintah Desa menuntut adanya kesiapan pemerintah desa baik dari segi kelembagaan dan ketersediaan aparatur desa yang profesional dan seperangkat aturan sehingga desa mampu mengelola semua potensi dan sumber-sumber daya yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki tanggungjawab yang besar untuk menyiapkan Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

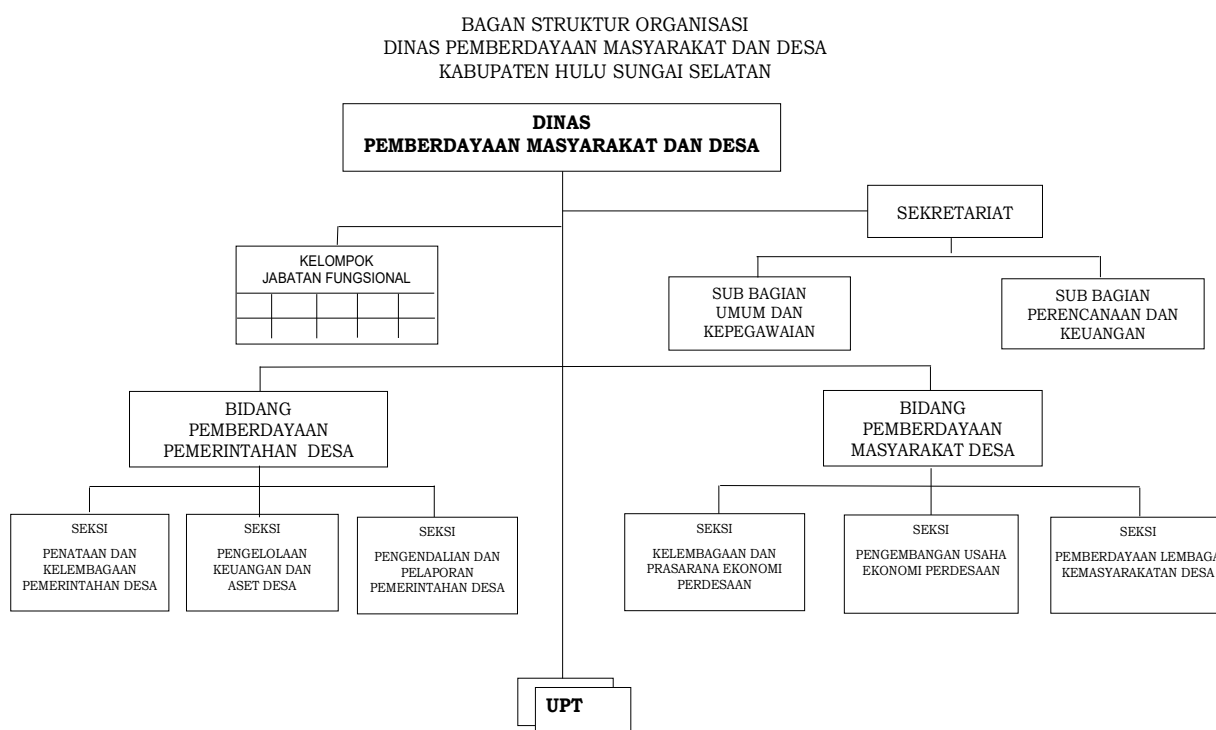
Pada kondisi saat ini kapasitas pemberdayaan masyarakat desa masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata nilai indeks desa membangun Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih rendah dan masih adanya desa dengan status desa tertinggal. Indeks desa membangun adalah komposit dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi. Disamping itu Desa merupakan institusi pemerintahan yang paling rendah dan berhadapan langsung dengan masyarakat yang dilayani. Seiring dengan perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi maka pemerintah desa juga dituntut adanya paradigma pelayanan masyarakat yang cepat, mudah dan prima dengan memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut. Namun kesiapan sarana prasarana dan kemampuan sumber daya manusia di desa belum mampu mengimbangi laju perkembangan teknologi informasi. Hal ini terlihat dari minimnya pelayanan pemerintah desa yang telah menerapkan penggunaan teknologi informasi.

1.2. Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemberdayaan pemerintahan desadan pemberdayaan masyarakat desa serta serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan bidang pemberdayaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pemberdayaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- f. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa sebagaimana gambar berikut ini.



Gambag 1.1 : Struktur Organisasi dan Tata Laksana Dinas PMD berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan posisi yang strategis bagi Desa. dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yang secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, pengawasan dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat melalui bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa .

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PMD. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 mempunyai visi Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, sebagai berikut :

1. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya.
2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian.
4. Mengoptimalkan sumber daya daerah, berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

5. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan agamis.

Sesuai dengan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 terkait pada mewujudkan Misi ke-4 dan Misi ke-5, dengan sasaran pembangunan meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat dan sasaran meningkatnya penggunaan system informasi daerah. Adapun indikator kinerja sasaran terkait pemberdayaan masyarakat tersebut pada RPJMD sebagai berikut :

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Sasaran pada RPJMD 2018-2023
terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Sasaran di RPJMD	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJMD (2018)	Kondisi Akhir Kinerja RPJMD (2023)
1	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,62	0,71
2	Meningkatnya penggunaan system informasi daerah	Persentase Pemerintah Desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan	Persen	0,60	3,88

Keberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa dalam mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan dapat diukur dari nilai indeks desa membangun (IDM). Menurut Permendes, Pembangunan Desa Tertinggal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM) bahwa IDM adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa. Berdasarkan nilai IDM maka status perkembangan desa dapat diklasifikasikan menjadi 5 (lima) kategori dari status tertinggi ke rendah yaitu Desa Mandiri atau Desa Sembada, Desa Maju atau Desa Pra Sembada, Desa Berkembang atau Desa Madya, Desa Tertinggal atau Desa Pra Madya dan Desa Sangat Tertinggal atau desa Pratama.

Perkembangan desa pada saat awal pelaksanaan Renstra di Kabupaten Hulu Sungai Selatan didominasi oleh Desa berkembang sebanyak 99 Desa (69%), dengan kategori tertinggal sebanyak 39 Desa (27 %) serta Desa kategori maju sebanyak 6 Desa (4%). Adapun desa sangat tertinggal sudah tidak ada lagi, namun demikian stautus desa belum ada yang mencapai status desa mandiri. Hal ini merupakan tantangan tersendiri dan menjadi salah satu fokus target kinerja yang akan dicapai oleh Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk meningkatkan status perkembangan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan lima tahun kedepan.

Tuntutan pembangunan modern memaksa pemerintah beradaptasi dengan teknologi informasi. Sehingga pelayanan dengan berbasis teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini mampu mengakomodir belum optimalnya pelayanan publik serta paradigma mainstream masyarakat yaitu urusan pelayanan di pemerintah daerah sangat birokratif dan berbelit. Sampai pada tahun 2017, penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih belum berjalan optimal. Sehingga masih perlu mendapatkan proporsi afirmasi lebih. Inilah sebabnya mengapa pelayanan publik berbasis teknologi informasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih perlu untuk ditingkatkan

Desa merupakan bagian wilayah pemerintahan terkecil di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka wajah dan kualitas pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercermin dari kualitas pelayanan di Desa selaku lembaga pemerintah pada level paling bawah. Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat pada pemerintahan desa terus digalakkan dimulai dengan adanya kebijakan Desa Model yaitu pembangunan kantor Desa yang representative pada semua Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan pada tahun 2018 semua Kantor Desa di Kabupaten Hulu Sungai selatan telah permanen dengan konstruksi dan bentuk yang representative disamping itu juga pengadaan sarana dan prasarana seperti perangkat komputer dan meja kerja dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Indikator Kinerja Sasaran RPJMD terkait pemberdayaan masyarakat dan desa tersebut di atas juga merupakan indikator kinerja yang dijabarkan dalam tujuan, sasaran dan indikator kinerja pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2023, dengan target kinerja sebagaimana ditabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada Rencana Strategis Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Nilai / Predikat AKIP	Nilai	(79,41) BB	(82,55) A	(83,79) A	(86,42) A	(89,06) A
2	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6377	0,6551	0,6725	0,6898	0,7072
3	Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah	Persentase Pemerintah Desa yang menggunakan Teknologi informasi dalam pemberian pelayanan	Persen	8,33	15,97	23,61	31,25	38,88

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas PMD Kab. Hulu Sunyai Selatan.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Adapun Indikator Kinerja Dinas PMD yang pencapaiannya berkait langsung

dengan pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagaimana Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	4	
1	Nilai/Predikat AKIP	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%	Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKj Instansi Pemerintah.
2	Indeks Desa Membangun	Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa dan menunjukkan tingkat kemajuan dan kemandirian suatu desa. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $IDM = \frac{\sum IDM \text{ se Kab.HSS}}{\sum \text{Desa se Kab.HSS}}$ </div> <div style="font-size: small;"> IDM : Rata-rata Indeks Desa Membangun Kab.HSS $\sum IDM \text{ se Kab.HSS}$: Jumlah IDM Desa se Kab.HSS $\sum \text{Desa se Kab.HSS}$: Jumlah Desa se Kab.HSS </div>	Permendes, PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun
3	Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	untuk mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat di desa perlu memanfaatkan kemajuan teknologi yaitu teknologi informasi. dihitung dengan rumus : <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $= \frac{\text{Jumlah Desa yang menggunakan aplikasi IT}}{\text{Jumlah Desa se Kab.HSS}} \times 100 \%$ </div>	Hasil Evaluasi dan monitoring atas penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa

Orgnisasi Perangkat Daerah dibentuk dalam rangka mencapai indikator kinerja Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas PMD Kab.HSS yang mendukung pencapaian RPJMD Pemkab. Hulu Sungai Selatan yaitu untuk mencapai Misi 4 dan misi 5 sebagaimana terlihat pada tabel di atas.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisi tentang penugasan dari kepala daerah sebagai pemberi amanah kepada pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program /kegiatan yang disertai indikator kinerja.

Setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Tahun anggaran 2019 disahkan maka dilaksanakan perjanjian kinerja oleh pejabat

masing-masing kepada atasan langsung secara berjenjang mulai dari pejabat tinggi pratama, administrator dan pengawas sebagai tolak ukur dalam penilaian kinerja. Indikator kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama merupakan indikator kinerja SKPD Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dimana masing-masing indikator kinerja akan dicapai oleh pejabat administrator melalui pelaksanaan program. Demikian selanjutnya indikator kinerja pejabat administrator yang akan dicapai melalui pelaksanaan program berisi kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat pengawas. Adapun indikator kinerja Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019, sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.HSS
Tahun 2019

No	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan	Taerget Kinerja 2019	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa	Nilai / Predikat AKIP	79,41 (BB)	Kepala Dinas
1.1.	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen keuangan daerah	100% (15/15)	Sekretaris
a.	Penyusunan Dokumen Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	12	Kasubag Keuangan dan Perencanaan
b.	Penyusunan Dokumen AKIP	Jumlah Dokumen AKIP yang memenuhi kualitas	15	Sda
2.	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	Indeks Desa Membangun	0,64	Kepala Dinas
2.1	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	73,63% (1198/ 1627)	Kabid Pemberd Masyarakat Desa
a.	Bimbingan teknis pengurus LPM Desa	Jumlah Pengurus LPM yang terampil	40	Kasi Pemberd LKD
b.	Bimbingan Teknis RT/RW	Jumlah Pengurus RT/RW yang terampil	40	Sda
c.	Penilaian Posyandu	Jumlah Posyandu tk kec yang berprestasi dan dinilai Tk.Kab	11	Sda
d.	Penilaian Gotong royong Masyarakat	Jumlah desa yg memiliki budaya gotong royong tinggi yang di nilai	11 Desa	Sda
e.	Penilaian Inovasi Teknologi Tepat Guna	Jumlah Inovator TTG yang terseleksi	3	Sda
2.2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berkembang	13,88% (20/144)	Kabid Pemberd Masyarakat Desa
a.	Workshop Kemitraan Bumdes	Jumlah BUMDes yang melaksanakan kerjasama	40	Kasi Pengembangan Usaha Ekon Perdes
b.	Sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah pemangku kepentingan kawasan perdesaan	60	Sda
3	Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah	Persentase Pemerintah Desa yang menggunakan Teknologi Informasi dalam Pemberian pelayanan	8,33% (12/144)	Kepala Dinas
3.1	Program Pembinaan dan Pelayanan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang berkinerja baik	25,69% (37/144)	Kabid Pemberdayaan Pemerintahan Desa
a.	Evaluasi perencanaan dan rancangan APBDes	Jumlah Berita Acara Evaluasi APBDes	288	Kasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
b.	Pelaksanaan e-Monitoring System Desa	Jumlah Desa yang menerapkan e-Monitoring system	22 Desa	Kasi Pengendalian dan Pelaporan Pemdes
c.	Evaluasi perkembangan desa/kelurahan	Jumlah Desa/kelurahan yang di evaluasi	12 Desa/ Kelurahan	Sda

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama Tahun 2019 yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan sesuai dengan target pada tahun 2019. Pada bab ini juga akan disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi anggaran sampai dengan akhir Tahun 2019 sesuai dengan pencapaian target kinerja dalam perjanjian kinerja.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi merupakan dasar dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban dalam mencapai indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang termuat dalam RPJMD. IKU juga sebagai tolak ukur menilai capaian sasaran strategis Dinas. Adapun capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

1). Sasaran Strategi I : Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa

Untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, terdapat indikator utama sebagai tolak ukur pencapaian sasaran strategis tersebut yaitu Nilai/Predikat AKIP.

Nilai AKIP adalah hasil evaluasi atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku APIP atas Permen PAN Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi 5 komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal.

a. Perbandingan Capaian Nilai/Predikat AKIP terhadap Target Kinerja dan Capaian Tahun Sebelumnya.

Penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada organisasi perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten selalu aparat pengawas internal pemerintah. Evaluasi SAKIP dilaksanakan setelah pelaksanaan tahun anggaran, sehingga pada saat penyusunan laporan kinerja ini belum dilakukan evaluasi oleh APIP. Adapun target kinerja nilai AKIP yang ditargetkan dalam Renja Tahun 2019 yaitu 79,41(BB).

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa capaian nilai AKIP belum bisa ditampilkan karena belum dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibentuk sejak tahun 2017, sehingga pelaksanaan SAKIP dimulai tahun 2017 dan dilakukan evaluasi oleh APIP pada tahun 2017 dan 2018. Adapun capaian nilai AKIP sejak terbentuknya Dinas PMD adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Capaian Nilai Predikat AKIP terhadap Target Kinerja Tahun 2019

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	
		2017	2018
1	Nilai/Predikat AKIP	70,61 (BB)	79,061 (BB)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja Dinas PMD terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini karena perhatian dan komitmen dari pimpinan dalam rangka memperbaiki system akuntabilitas instansi pemerintah.

b. Perbandingan Realisasi Nilai/Predikat AKIP terhadap Target Rencana Jangka Menengah dalam RENSTRA

Upaya meningkatkan nilai akuntabilitas instansi pemerintah dilakukan secara terus menerus. Pada akhir pelaksanaan Renstra Dinas PMD diharapkan memperoleh nilai Sangat Baik dengan predikat A. Maka realisasi nilai/predikat AKIP tahun 2019 dibandingkan dengan kondisi tahun 2023 pada akhir renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Nilai AKIP Tahun 2018 dibanding 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2023
1	Nilai/Predikat AKIP	B	A

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa untuk mencapai Nilai AKIP yang diinginkan pada akhir Renstra cukup berat jika dibandingkan capaian saat ini. Namun demikian dengan upaya perbaikan yang terus menerus dilakukan maka optimis akan dicapai di akhir pelaksanaan Renstra.

c. Perbandingan Capaian Nilai Predikat AKIP terhadap Capaian Nilai/Predikat AKIP Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2019 memperoleh Nilai BB. Sedangkan Nilai AKIP Dinas PMD berdasarkan capaian tahun 2018 memperoleh nilai dengan predikat BB atau sama dengan predikat yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

d. Analisis Keberhasilan Pencapaian Nilai/Predikat AKIP

Nilai AKIP yang dicapai oleh Dinas PMD dengan predikat BB cukup baik. Beberapa factor yang mendukung keberhasilan mencapai target kinerja nilai predikat AKIP dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1). Adanya perhatian dan komitmen dari pimpinan daerah terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik pada Pemerintah Daerah maupun SKPD. Hal ini ditunjukkan dengan kehadiran Bupati Hulu Sungai Selatan pada rapat SAKIP dan pelaksanaan evaluasi oleh Kementerian PAN RB.
- 2). Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik pejabat dan seluruh ASN Dinas PMD dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

e. Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Nilai/Predikat AKIP

Program yang dilaksanakan untuk mencapai target Nilai AKIP yaitu Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, yang terdiri atas 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan penyusunan dokumen keuangan dan kegiatan penyusunan dokumen AKIP. Adapun indikator kinerja atas pelaksanaan program ini yaitu tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP & tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen keuangan daerah.

Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dengan target kinerja sebesar 77,78 % atau 21 Dokumen yang harus dipenuhi terdiri dari 10 dokumen laporan keuangan yang dipenuhi tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pemenuhan Dokumen Keuangan Tahun 2019

No	Nama Dokumen	Jumlah
1	Renstra	1 Dokumen
2	Renja	1 Dokumen
3	RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan	2 Dokumen
4	Pra RKA Murni	1 Dokumen
5	RKA Murni	1 Dokumen
6	DPA	1 Dokumen
7	Laporan Triwulan II	1 Dokumen
8	Laporan Prognoses Semester I	1 Dokumen
Jumlah		10 Dokumen

Sedangkan untuk menyusun dokumen SAKIP terdapat 11 Dokumen yang telah dipenuhi pada Tahun 2019, yaitu :

Tabel 3.4
Pemenuhan Dokumen AKIP Tahun 2019

No	Nama Dokumen	Jumlah
1	Renstra	1 Dokumen
2	Berita Acara Reviu Renstra	1 Dokumen
3	Casacading kinerja Tahun 2019	1 Dokumen
4	Renja 2019 Murni	1 Dokumen
5	SK IKU Tahun 219	1 Dokumen
6	PK Murni pejabat struktural dan pelaksana	1 Dokumen
7	PK Perubahan pejabat struktural dan pelaksana	1 Dokumen
8	Rencana Aksi 2019	1 Dokumen
9	Capaian Kinerja Triwulan Tahun 2019	2 Dokumen
10	Peta Strategis dan struktur organisasi serta tamplate format keselarasan kinerja	1 Dokumen
Jumlah		11 Dokumen

Faktor pendukung tercapainya target kinerja pada indator ini antara lain karena kedisiplinan petugas dalam memenuhi dokumen-dokumen perencanaan maupun keuangan sesuai jadwal yang ditetapkan. Disamping itu juga adanya bimbingan dari Tim SAKIP kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Dinas PMD dalam memenuhi dokumen SAKIP.

2). Sasaran Strategi II : Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa

Indikator utama yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat desa, yaitu nilai Indeks Desa Membangun (IDM). Pengukuran IDM dilakukan secara berjenjang mulai tingkat Desa dan verifikasi di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan tingkat Nasional. Secara resmi nilai IDM ditetapkan oleh Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Proses pengukuran IDM dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa kemudian diverifikasi di tingkat Kecamatan dan Kabupaten serta provinsi dan nasional. Untuk pengukuran IDM tahun 2019 saat ini telah dilakukan pengukuran mulai tingkat Desa, Kabupaten dan datanya sudah diserahkan ke tingkat Provinsi, dan sedang dalam proses evaluasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Nilai IDM menunjukkan tingkat kemajuan dan kemandirian suatu Desa. Klasifikasi status desa dikategorikan dengan ambang batas sebagai berikut :

- 1). Desa Sangat Tertinggal, dengan nilai $IDM < 0,4907$
- 2). Desa Tertinggal, dengan nilai $0,4907 < IDM \leq 0,5989$
- 3). Desa Berkembang, dengan nilai $0,5989 < IDM \leq 0,7072$
- 4). Desa Maju, dengan nilai $0,7072 < IDM \leq 0,8155$
- 5). Desa Mandiri, dengan nilai $0,7072 < IDM \leq 0,8155$

Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri Nilai IDM dan Status Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5
 Nilai IDM dan Status Perkembangan Desa
 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019

NO	NAMA DESA	IKS 2019	IKE 2019	IKL 2019	NILAI IDM 2019	STATUS IDM 2019
1	Hamalau	0.8171	0.7833	0.6667	0.7557	Maju
2	Telaga Bidadari	0.6857	0.5667	0.6000	0.6175	Berkembang
3	Karasikan	0.7829	0.5000	0.6667	0.6499	Berkembang
4	Sungai Raya Utara	0.7257	0.4667	0.6667	0.6197	Berkembang
5	Sungai Raya Selatan	0.7314	0.5833	0.6667	0.6605	Berkembang
6	Hariti	0.7886	0.5667	0.6000	0.6518	Berkembang
7	Ida Manggala	0.6686	0.5667	0.6667	0.6340	Berkembang
8	Bumi Berkat	0.6686	0.5000	0.6667	0.6118	Berkembang
9	Batang Kulur Kiri	0.7771	0.6167	0.6000	0.6646	Berkembang
10	Batang Kulur Tengah	0.7657	0.5667	0.6667	0.6664	Berkembang
11	Batang Kulur Kanan	0.7200	0.4667	0.6667	0.6178	Berkembang
12	Baru	0.7257	0.5333	0.6667	0.6419	Berkembang
13	Tamiyang	0.7943	0.5167	0.6000	0.6370	Berkembang
14	Asam	0.7657	0.4333	0.6667	0.6219	Berkembang
15	Sungai Kali	0.7371	0.5000	0.7333	0.6568	Berkembang
16	Sarang Halang	0.7143	0.5000	0.6667	0.6270	Berkembang
17	Paring Agung	0.7143	0.6000	0.6667	0.6603	Berkembang
18	Tanah Bangkang	0.7886	0.5167	0.6667	0.6573	Berkembang
19	Karang Jawa Muka	0.8571	0.6333	0.6000	0.6968	Berkembang
20	Karang Jawa	0.7486	0.4500	0.6000	0.5995	Berkembang
21	Tabihi	0.7771	0.6000	0.6667	0.6813	Berkembang
22	Pandulangan	0.7086	0.6333	0.6667	0.6695	Berkembang
23	Kaliring	0.7886	0.5833	0.5333	0.6351	Berkembang
24	Jambu Hulu	0.7143	0.5000	0.6000	0.6048	Berkembang
25	Pahampangan	0.7829	0.5833	0.6000	0.6554	Berkembang
26	Padang Batung	0.7486	0.6333	0.6000	0.6606	Berkembang
27	Jembatan Merah	0.7086	0.5333	0.6000	0.6140	Berkembang
28	Batu Bini	0.6000	0.7167	0.8000	0.7056	Berkembang
29	Mawangi	0.7429	0.7500	0.4667	0.6532	Berkembang
30	Madang	0.6971	0.4667	0.8667	0.6768	Berkembang
31	Durian Rabung	0.7714	0.4833	0.6000	0.6182	Berkembang
32	Jelatang	0.6857	0.5500	0.6667	0.6341	Berkembang
33	Batu Laki	0.7429	0.5667	0.6667	0.6588	Berkembang
34	Malutu	0.7314	0.5333	0.5333	0.5993	Berkembang
35	Malilingin	0.7714	0.5667	0.6000	0.6460	Berkembang
36	Lok Binuang	0.7657	0.5000	0.7333	0.6663	Berkembang
37	Telaga Langsung	0.6571	0.6667	0.6667	0.6635	Berkembang
38	Mandala	0.8686	0.6333	0.6000	0.7006	Berkembang
39	Ambutun	0.7371	0.4500	0.6667	0.6179	Berkembang
40	Hamak	0.7200	0.6167	0.7333	0.6900	Berkembang
41	Hamak Timur	0.7657	0.6167	0.7333	0.7052	Berkembang
42	Hamak Utara	0.7486	0.3833	0.6000	0.5773	Tertinggal
43	Pakuan Timur	0.7429	0.5500	0.6667	0.6532	Berkembang
44	Gumbil	0.7143	0.5167	0.6667	0.6326	Berkembang
45	Longawang	0.7486	0.5000	0.6667	0.6384	Berkembang

46	Pandulangan	0.7371	0.6000	0.6667	0.6679	Berkembang
47	Bamban Utara	0.7886	0.5000	0.6667	0.6518	Berkembang
48	Bamban	0.7429	0.6833	0.8000	0.7421	Maju
49	Bamban Selatan	0.7429	0.6333	0.6667	0.6810	Berkembang
50	Kayu Abang	0.7714	0.6833	0.5333	0.6627	Berkembang
51	Angkinang	0.8629	0.7000	0.5333	0.6987	Berkembang
52	Telaga Sili-Sili	0.7486	0.5000	0.6667	0.6384	Berkembang
53	Angkinang Selatan	0.7543	0.6500	0.6667	0.6903	Berkembang
54	Tawia	0.6686	0.6333	0.6667	0.6562	Berkembang
55	Taniran Kubah	0.8000	0.6333	0.4667	0.6333	Berkembang
56	Taniran Selatan	0.8171	0.6000	0.8667	0.7613	Maju
57	Bakarung	0.7771	0.6667	0.6000	0.6813	Berkembang
58	Gambah Luar	0.8000	0.6000	0.6667	0.6889	Berkembang
59	Gambah Luar Muka	0.8229	0.6667	0.6000	0.6965	Berkembang
60	Gambah Dalam	0.7714	0.6333	0.6667	0.6905	Berkembang
61	Gambah Dalam Barat	0.6857	0.6333	0.8000	0.7063	Berkembang
62	Sungai Kupang	0.8800	0.5000	0.7333	0.7044	Berkembang
63	Bangkau	0.6914	0.5833	0.8000	0.6916	Berkembang
64	Lungau	0.8686	0.5500	0.5333	0.6506	Berkembang
65	Sungai Paring	0.7714	0.5667	0.8000	0.7127	Maju
66	Bariang	0.7771	0.5667	0.6667	0.6702	Berkembang
67	Amawang Kiri	0.6971	0.7333	0.6667	0.6990	Berkembang
68	Amawang Kiri Muka	0.7886	0.5500	0.6000	0.6462	Berkembang
69	Amawang Kanan	0.8800	0.5167	0.6667	0.6878	Berkembang
70	Tibung Raya	0.9429	0.7500	0.6667	0.7865	Maju
71	Baluti	0.9086	0.6000	0.8667	0.7918	Maju
72	Tebing Tinggi	0.8057	0.4833	0.6667	0.6519	Berkembang
73	Simpur	0.7486	0.6833	0.6667	0.6995	Berkembang
74	Garunggang	0.7314	0.6000	0.6667	0.6660	Berkembang
75	Amparaya	0.7200	0.5167	0.6667	0.6345	Berkembang
76	Panjampang Bahagia	0.7200	0.4833	0.6667	0.6233	Berkembang
77	Ulin	0.7086	0.6333	0.6667	0.6695	Berkembang
78	Pantai Ulin	0.7257	0.5667	0.6000	0.6308	Berkembang
79	Wasah Hulu	0.7600	0.5667	0.6000	0.6422	Berkembang
80	Wasah Tengah	0.8000	0.7000	0.5333	0.6778	Berkembang
81	Wasah Hilir	0.7371	0.6667	0.6667	0.6902	Berkembang
82	Kapuh	0.7657	0.6333	0.6667	0.6886	Berkembang
83	Muning Baru	0.7486	0.6000	0.9333	0.7606	Maju
84	Muning Dalam	0.7486	0.3000	0.6000	0.5495	Tertinggal
85	Muning Tengah	0.7200	0.5667	0.5333	0.6067	Berkembang
86	Banjarbaru	0.7657	0.5833	0.5333	0.6274	Berkembang
87	Bayanan	0.8057	0.6667	0.6000	0.6908	Berkembang
88	Pandan Sari	0.8114	0.6000	0.4667	0.6260	Berkembang
89	Pihanin Raya	0.7371	0.7167	0.4000	0.6179	Berkembang
90	Tumbukan Banyu	0.8971	0.8667	0.6667	0.8102	Maju
91	Sungai Pinang	0.8171	0.5333	0.7333	0.6946	Berkembang
92	Habirau	0.7543	0.5667	0.6000	0.6403	Berkembang
93	Habirau Tengah	0.8400	0.6500	0.4667	0.6522	Berkembang
94	Parigi	0.8057	0.4667	0.6000	0.6241	Berkembang
95	Banua Hanyar	0.7543	0.6667	0.6000	0.6737	Berkembang

96	Tambangan	0.7943	0.6333	0.8000	0.7425	Maju
97	Baruh Jaya	0.7943	0.5833	0.6000	0.6592	Berkembang
98	Samuda	0.7771	0.6000	0.6667	0.6813	Berkembang
99	Pakapuran Kecil	0.8743	0.6167	0.5333	0.6748	Berkembang
100	Panggandingan	0.7943	0.6500	0.6667	0.7037	Berkembang
101	Tambak Bitin	0.8971	0.7667	0.5333	0.7324	Maju
102	Pakan Dalam	0.7429	0.6333	0.5333	0.6365	Berkembang
103	Paramaian	0.7200	0.6000	0.6000	0.6400	Berkembang
104	Pandak Daun	0.8343	0.5833	0.4667	0.6281	Berkembang
105	Murung Raya	0.8229	0.6833	0.5333	0.6798	Berkembang
106	Balah Paikat	0.7200	0.5667	0.5333	0.6067	Berkembang
107	Sungai Garuda	0.7714	0.6167	0.6000	0.6627	Berkembang
108	Sungai Mandala	0.8171	0.5833	0.4000	0.6001	Berkembang
109	Mdl. Murung Mesjid	0.7257	0.5667	0.6667	0.6530	Berkembang
110	Baruh Kembang	0.8629	0.6500	0.6000	0.7043	Berkembang
111	Teluk Haur	0.7829	0.6000	0.6667	0.6832	Berkembang
112	Pasungkan	0.7429	0.5500	0.5333	0.6087	Berkembang
113	Teluk Kabak	0.8057	0.5667	0.6667	0.6797	Berkembang
114	Hamayung	0.6514	0.6000	0.6667	0.6394	Berkembang
115	Hamayung Utara	0.7371	0.5667	0.6000	0.6346	Berkembang
116	Paharangan	0.7943	0.5000	0.6000	0.6314	Berkembang
117	Hakurung	0.7486	0.5000	0.5333	0.5940	Tertinggal
118	Balimau	0.7257	0.4333	0.8667	0.6752	Berkembang
119	Karang Paci	0.6857	0.5000	0.6667	0.6175	Berkembang
120	Bago Tanggul	0.7143	0.3500	0.5333	0.5325	Tertinggal
121	Karang Bulan	0.7200	0.5167	0.8000	0.6789	Berkembang
122	Balanti	0.7714	0.5833	0.4667	0.6071	Berkembang
123	Kalumpang	0.7029	0.5000	0.7333	0.6454	Berkembang
124	Tamingkar	0.7371	0.5000	0.6667	0.6346	Berkembang
125	Sirih	0.7943	0.6000	0.6667	0.6870	Berkembang
126	Sirih Hulu	0.7771	0.4333	0.6667	0.6257	Berkembang
127	Halunuk	0.6000	0.5500	0.6667	0.6056	Berkembang
128	Panggungan	0.6743	0.4667	0.6667	0.6026	Berkembang
129	Lumpangi	0.6571	0.5500	0.6667	0.6246	Berkembang
130	Malinau	0.7029	0.4833	0.6667	0.6176	Berkembang
131	Hulu Banyu	0.6057	0.5333	0.6667	0.6019	Berkembang
132	Tumingki	0.6286	0.3667	0.9333	0.6429	Berkembang
133	Kamawakan	0.5486	0.2833	0.6667	0.4995	Tertinggal
134	Lok Lahung	0.7029	0.4333	0.6667	0.6010	Berkembang
135	Loksado	0.7086	0.5500	0.9333	0.7306	Maju
136	Haratai	0.6857	0.4667	0.6667	0.6064	Berkembang
137	Ulang	0.7943	0.5000	0.6667	0.6537	Berkembang
138	Siang Gantung	0.6914	0.3667	0.5333	0.5305	Tertinggal
139	Baru	0.7029	0.2500	0.6000	0.5176	Tertinggal
140	Tanjung Selor	0.5486	0.4000	0.6000	0.5162	Tertinggal
141	Badaun	0.6457	0.3667	0.6000	0.5375	Tertinggal
142	Bajayau	0.7086	0.4000	0.5333	0.5473	Tertinggal
143	Bajayau Tengah	0.6171	0.3667	0.6000	0.5279	Tertinggal
144	Bajayau Lama	0.6229	0.5500	0.5333	0.5687	Tertinggal

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa tingkat perkembangan desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan tahun 2019 menurut kategori perkembangannya, sebagai berikut :

Tabel 3.6
Rekapitulasi Tingkat Perkembangan Desa
di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019

NO	KATEGORI DESA	JUMLAH	PERSENTASE
1	Mandiri	0	0%
2	Maju	11	7,64%
3	Berkembang	121	84,03%
4	Tertinggal	12	8,33%
5	Sangat Tertinggal	0	0%
JUMLAH		144	100%

Adapun tingkat perkembangan desa dalam beberapa tahun terakhir terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.7
Perkembangan Kategori Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2017, 2018, 2019

NO	KATEGORI STATUS DESA	TAHUN		
		2017	2018	2019
1	Mandiri	-	-	-
2	Maju	6	6	11
3	Berkembang	100	99	121
4	Tertinggal	38	39	12
5	Sangat Tertinggal	-	-	-
JUMLAH		144	144	144

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa perkembangan kategori Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tiga tahun terakhir menunjukkan adanya perkembangan yang cukup baik, yaitu dengan berkurangnya jumlah desa sangat tertinggal dan tertinggal, serta meningkatnya jumlah desa berkembang, maju dan mandiri.

Adapun capaian rata-rata IDM dibandingkan dengan data-data lainnya dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Perbandingan Capaian IDM terhadap Target Kinerja Tahun 2019

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah nilai komposit dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi. IDM yang dimaksud sebagai IKU Dinas PMD adalah rata-rata IDM yang dicapai oleh seluruh Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan rumus :

$$IDM = \frac{\sum IDM \text{ se Kab.HSS}}{\sum Desa \text{ se Kab.HSS}}$$

IDM : Rata-rata IDM Kab.HSS
 \sum IDM se Kab.HSS : Jumlah IDM Desa se Kab.HSS
 \sum Desa se Kab.HSS : Jumlah Desa se Kab.HSS

Maka rata-rata IDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019, sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rata-rata IDM Kab.HSS} &= \frac{93.7545}{144} \\ &= 0,6511 \end{aligned}$$

Jika diimplementasikan sesuai dengan interval penilaian maka perkembangan desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, rata-rata berkembang.

Adapun perbandingan target indikator kinerja utama terhadap target kinerja tahun 2019, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.8

Capaian IDM terhadap Target Kinerja Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Rata-Rata IDM	0,6377	0,6511	102,10%

Dalam tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata IDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu 102,10%.

b. Perbandingan Capaian IDM terhadap Capaian Tahun Sebelumnya

Pengukuran IDM telah dilakukan sejak tahun 2015, namun hasil data hasil pengukuran di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat tahun 2017,2018 dan 2019, sebagai berikut :

Tabel 3.9

Capaian Rata-rata IDM Tahun 2017,2018 dan 2019

No	INDIKATOR KINERJA	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Rata-Rata IDM Kab.HSS	0,6199	0,6204	0,6511

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir capaian rata-rata IDM di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami peningkatan.

- c. Perbandingan Capaian IDM terhadap Target Rencana Jangka Menengah dalam RENSTRA

Renstra Dinas PMD disusun dalam rangka menjabarkan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Terkait dengan target indikator rata-rata IDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada akhir pelaksanaan Renstra tahun 2023 diharapkan rata-rata tingkat perkembangan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan kategori maju. Hal ini terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.10

Capaian Rata-rata IDM 2019 terhadap Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra 2023	Realisasi Tahun 2019	Capaian
1	2	3	4	5
1	Indeks Desa Membangun	0,7072	0,6511	92,62%

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa sampai dengan pelaksanaan Renstra periode tahun ke dua pada tahun 2019 belum mencapai harapan kondisi pada akhir pelaksanaan Renstra. Namun dengan capaian 92,62% dari kondisi akhir Renstra yang diharapkan, maka capaian 2019 cukup optimis pada 3 (tiga) tahun ke depan bisa tercapai kondisi yang diharapkan pada akhir pelaksanaan Renstra.

- d. Perbandingan Capaian IDM terhadap Capaian IDM Pemerintah Provinsi Kasel serta Nasional

Pada RPJMN 2014-2019 terkait IDM indikator kinerja sasaran strategis pada Pemerintah Pusat khususnya pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia yaitu berkurangnya 5.000 Desa Tertinggal dan meningkatkan 2.000 Desa Mandiri. Adapun target kinerja pada RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu meningkatnya Desa mandiri dan menurunnya Desa tertinggal sebanyak 750 Desa atau 150 Desa setiap tahun.

Tabel 3.11

Perbandingan Capaian Status Desa berdasarkan IDM di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Nasional Tahun 2019

No	Status Desa	Nasional	Prov. Kalsel	Kab. HSS
1	Mandiri	-	4	0
2	Maju	2	121	12
3	Berkembang	22	1303	121
4	Tertinggal	8	407	11
5	Sangat Tertinggal	2	28	0
Jumlah		34	1863	144

e. Analisis Keberhasilan Pencapaian IDM

IDM merupakan komposit dari nilai indeks ketahanan sosial (IKS) indeks ketahanan ekonomi (IKE) dan indeks ketahanan ekologi (IKEkologi). Untuk dapat meningkatkan nilai rata-rata IDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka perlu ditingkatkan nilai semua aspek pada IKS, IKE dan IKEkologi.

Berdasarkan evaluasi pencapaian IDM pada masing-masing komponen yang masih rendah pada aspek ketahanan Ekonomi rata-rata 0,5609 Sedangkan pada aspek ketahanan sosial dan ketahanan ekologi masing-masing 0,7502 dan 0,6421 . Adapun faktor yang menjadi penunjang pencapaian IDM, sebagai berikut :

- a. Pemerintahan desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa yang menggunakan IDM sebagai salah satu acuan dalam penyusunan kegiatan dalam APBDes.
- b. Adanya dukungan program listas sektor pada SKPD terkait seperti penyediaan sarana prasarana pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan untuk akses masyarakat ke sarana pendidikan, kesehatan maupun pusat ekonomi masyarakat .

f. Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian IDM

Dalam rangka untuk meningkatkan nilai pada aspek-aspek penyusun nilai IDM diperlukan sinergitas program lintas sektor, antara lain bidang pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan lainnya. Namun Pada Dinas PMD sendiri sebagai SKPD utama yang bertanggungjawab dalam pencapaian nilai IDM, pada tahun 2019 terdapat 2 (dua) program yang terkait langsung dengan upaya peningkat nilai IDM yaitu Program peningkatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi 5 kegiatan, dan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan, yang terdiri atas 2 Kegiatan.

Adapun indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan Program Peningkatan pemberdayaan masyarakat yaitu Persentase Lembaga kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif. Menurut Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, LKD adalah mitra Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat serta perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat 1.627 LKD terdiri atas jenis LKD yaitu : 148 LPM Desa/Kel, 148 PKK Desa/Kel, 1.030 RT/RK, 296 Posyandu serta 5 Lembaga Adat.

LKD yang Aktif, yaitu jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki sekretariat yang tetap
- b. Memiliki legalitas, yaitu ditetapkan dengan Keputusan Kades
- c. Berpartisipasi ikut secara aktif dalam forum Musrenbang di desa
- d. Aktif terlibat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa
- e. Aktif menggerakkan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi LKD yang dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2019 terdapat 1.202 LKD Aktif. Dengan demikian persentase LKD Aktif pada tahun 2019, yaitu :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase LKD Aktif} &= \frac{\text{Jumlah LKD Aktif}}{\text{Jumlah LKD se Kab.HSS}} \\
 &= \frac{1.202}{1.627} \\
 &= 73,87 \%
 \end{aligned}$$

Dengan semakin besarnya Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif, maka upaya menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat semakin besar pula sehingga berkontribusi dalam meningkatkan nilai IDM dari indeks ketahanan sosial dan indeks ketahanan ekologi.

Pada Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan untuk mengukur keberhasilan program dengan indikator persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berkembang. Menurut Permendagri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa bahwa BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan jasa usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Upaya pembentukan BUMDes melalui fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah dilaksanakan sehingga pada tahun 2018 ini semua Desa sudah memiliki BUMDesa. Upaya selanjutnya yaitu membina BUMDes yang sudah terbentuk tersebut sehingga tetap eksis dan berkembang. BUMDes dinyatakan berkembang jika memenuhi kriteria, sebagai berikut :

- a. Memiliki minimal 2 (dua) unit usaha yang produktif
- b. Memberi kontribusi ke PADes minimal 10 % dari penyertaan modal per tahun.
- c. Memberi kontribusi minimal 50 % untuk Rumah Tangga Miskin di Desa tersebut.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi atas BUMDes- BUMDes yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pada tahun 2019 terdapat 20 BUMDes yang memenuhi kriteria sebagai BUMDes yang berkembang, yaitu :

- 1). BUMDes “Bhakti” Desa Gambah Dalam Barat
- 2). BUMDes “ Al Karomah” Desa Sungai Mandala
- 3). BUMDes “ Antaludin Makmur Desa Madang
- 4). BUMDes “Oasis” Desa panjampang Bahagia
- 5). BUMDes “Sasain Maju” Desa Hamak
- 6). BUMDes “ Laris Manis” Desa Gambah Luar Muka
- 7). BUMDes “ Surya Mitra sejati” Desa Muning Baru
- 8). BUMDes “ Serumpun” Desa Mawangi
- 9). BUMDes “ Berkah Bersama” Desa Sungai raya Selatan
- 10). BUMDes “ Sehati” Desa Hulu Banyu
- 11). BUMDes “ Tambak Rejeki Sejahtera” Desa Tambak Bitin
- 12). BUMDes “ Serumpun Bambu” Desa Durian Rabung
- 13). BUMDes “ Berkat sekumpul” Desa Amawang Kiri
- 14). BUMDes “ Berkah” Desa Amawang Kanan
- 15). BUMDes “ Karya Bersama” Desa Muning Dalam
- 16). BUMDes “ Jumjung Buih ” Desa Banua Hanyar
- 17). BUMDes “ Rejeki Bersama” Desa Angkinang
- 18). BUMDes “ Madani kapuh” Desa Kapuh
- 19). BUMDes “ Karya Mandiri” Desa Mandiri
- 20). BUMDes “ Anugerah Lestari” Desa Bajayau Lama

Keberadaan BUMDes ini sangat besar pengaruhnya dalam meningkatkan nilai IDM dari komponen nilai indeks ketahanan ekonomi. Upaya yang akan dilakukan oleh Dinas PMD dalam meningkatkan jumlah BUMDes yang berkembang yaitu dengan memaksimalkan peran pendamping P3MD untuk lebih intensif dalam pembinaan BUMDes.

3). Sasaran Strategi III : Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah

Alat ukur yang digunakan sebagai indikator utama mencapai sasaran strategis meningkatnya penggunaan system informasi daerah yaitu persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan. Tuntutan pembangunan modern memaksa pemerintah beradaptasi dengan teknologi informasi. Sehingga pelayanan dengan berbasis teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini mampu mengakomodir belum optimalnya pelayanan publik serta paradigma mainstream masyarakat yaitu urusan pelayanan di pemerintah daerah sangat birokratif dan berbelit.

Pengukuran terhadap pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan dilakukan secara mandiri oleh Dinas PMD melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ke Desa-Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Desa merupakan bagian wilayah pemerintahan terkecil di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka wajah dan kualitas pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercermin dari kualitas pelayanan di Desa selaku lembaga pemerintah pada level paling bawah. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi atas pelayanan pemerintah desa pada tahun 2019 terdapat 13 Desa yang menerapkan penggunaan Teknologi Informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu melalui aplikasi berbasis komputer yaitu :

- 1). Desa Gambah Luar Muka
- 2). Desa Bamban Selatan
- 3). Desa Bamban
- 4). Desa Banjarbaru
- 5). Desa Pihanin Raya
- 6). Desa Muning Baru
- 7). Desa Tibung Raya
- 8). Desa Amawang Kanan
- 9). Desa Sungai Paring
- 10). Desa Amawang Kiri
- 11). Desa Sungai Kupang
- 12). Desa Gumbil

Adapun berbandingan capaian persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan terhadap data lainnya, sebagai berikut :

a. Perbandingan Capaian indikator persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan terhadap Target Kinerja

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan desa pada tahun 2019 terdapat 12 Desa yang menyelenggarakan pelayanan berbasis teknologi informasi. Pelayanan yang dilaksanakan desa berupa pelayanan administrasi kependudukan dan surat menyurat. Dengan demikian jumlah desa yang menyelenggarakan pelayanan berbasis teknologi informasi terhadap jumlah desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dapat dihitung, yaitu:

= Jumlah Desa yang menyelenggarakan pelayanan berbasis IT

Jumlah Desa se Kabupaten Hulu Sungai Selatan

= 13 x 100%

144

= 9,03 %

Adapun capaian kinerja dibandingkan dengan target kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.12
Capaian Indikator Persentase Pemerintah Desa yang Menggunakan Teknologi Informasi dalam Pemberian Pelayanan Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian
1	Persentase Pemerintah Desa yang Menggunakan Teknologi Informasi dalam Pemberian Pelayanan	8,33 %	9,03%	108,04%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pada Indikator Kinerja Utama Persentase Pemerintah Desa yang Menggunakan Teknologi Informasi dalam Pemberian Pelayanan yang ditargetkan pada tahun 2019 sebanyak 12 Desa telah terealisasi sebanyak 13 Desa atau melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 108,04%.

b. Perbandingan Capaian indikator persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan terhadap Capaian Tahun Sebelumnya

Pemerintah Desa merupakan ujung tombak yang langsung berhadapan dalam memberikan pelayanana kepada masyarakat. Pada peride pelaksanaan Renstra sebelumnya tahun 2014-2018 diutamakan untuk menyediakan kantor desa sebagai pusat pelayanan, sehingga semua Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah memiliki bangunan kantor yang representatif. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanna yang cepat dan memuaskan maka mulai periode Renstra 2018-2023 ditargetkan penggunaan pelayanan berbasis teknologi informasi. Adapun perkembangan desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan ke masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.13
Pemerintah Desa yang menggunakan Teknologi Informasi dalam
Pemberian Pelayanan Tahun 2018-2018

No	Indikator Kinerja	2018	2019
1	Jumlah Desa yang menggunakan Teknologi Informasi dalam Pemberian Pelayanan	1	13
	Jlh Desa se Kab.HSS	144	144
	Persentase	0,6%	9,03%

Pada tabel menunjukkan bahwa perkembangan jumlah desa yang menggunakan IT cukup baik, dengan penambahan sebanyak 11 Desa dari kondisi tahun 2018.

c. Perbandingan Capaian indikator persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan terhadap Target Rencana Jangka Menengah dalam RENSTRA

Dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah desa berbasis IT memerlukan waktu yang akan dicapai secara bertahap. Sampai dengan akhir periode pelaksanaan Renstra pada tahun 2023 diharapkan terdapat minimal 55 Desa atau 38,88% Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menggunakan IT dalam pelayanan. Maka capaian tahun 2019 dibandingkan dengan yang akan dicapai diakhir pelaksanaan Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.14

Capaian Jumlah Pemerintah Desa yang Menggunakan Teknologi Informasi dalam Pemberian Pelayanan dibandingkan dengan Kondisi akhir Renstra Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Target Akhir Pelaksanaan Renstra 2023
1	Jumlah Pemerintah Desa yang Menggunakan Teknologi Informasi dalam Pemberian Pelayanan	13	56
	Jumlah Desa se Kab.HSS	144	144
	Persentase	9,03%	38,88%

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa sampai dengan pelaksanaan Renstra tahun ke-2 dibandingkan dengan target yang akan dicapai pada akhir pelaksanaan Renstra masih terdapat 33 Desa yang akan dicapai. Namun demikian target ini optimis akan dicapai dalam 3 tahun ke depan.

d. Analisis Hambatan Mencapai Keberhasilan Pencapaian persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan

Meskipun Jumlah Desa yang menggunakan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan pada tahun 2019 telah mencapai target yang ditetapkan, namun begitu banyak, hal ini karena adanya beberapa kondisi yang menyebabkan pencapaiannya lambat, antara lain dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Lemahnya SDM Perangkat Desa dalam penggunaan IT
- b. Jaringan internet yang belum menjangkau seluruh desa
- c. Keterbatasan sarana prasarana pelayanan.

Adapun upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan penggunaan IT pelayanan di Desa antara lain :

- 1). Penyediaan sarana prasarana pelayanan dan jaringan internet yang memadai di Kantor Desa menggunakan anggaran keuangan Desa.
- 2). Disamping itu kerjasama dengan Dinas Kominfo kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam memberikan pembinaan
- 3).Melaksanakan pembinaan terhadap Perangkat Desa dalam pengelolaan pelayanan di desa.
- 4). Memaksimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi ke desa.

e. Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian indikator persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan

Adapun program di Dinas PMD untuk mendukung pencapaian indikator tersebut yaitu melalui Program Pembinaan dan Pelayanan Pemerintahan Desa dengan indikator kinerja program yaitu persentase pemerintah desa yang berkinerja baik. Kriteria Pemerintah Desa berkinerja baik yaitu :

- a. Melaksanakan administrasi Desa dengan tertib
- b. Memiliki perencanaan keuangan dan pembangunan desa dengan baik
- c. Pelaporan keuangan desa yang akuntabel
- d. Pelaporan Penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu

Upaya meningkatkan persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan disamping melalui pelaksanaan program yang ada pada Dinas PMD juga didukung oleh kegiatan yang dianggarkan pada APBDes, antara lain melalui penyediaan sarana prasarana konektivitas internet.

3.2 Realisasi Anggaran

Pencapaian kinerja berbanding lurus dengan realisasi keuangan, sehingga setiap pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Dinas PMD dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Berikut ini disajikan realisasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Program
untuk Mencapai Target Kinerja Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persen tase
1	Nilai Predikat AKIP /	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	785.505.500	695.957.360	88,60%
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	143.937.000	115.079.257	79,95%
		Program peningkatan Pelayanan kinerja Perangkat Daerah	555.163.500	457.534.350	82,41%
		Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.586.000	9.286.000	96,87%
2	Indeks Desa Membangun	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	166.665.000	153.972.400	92,38%
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	38.950.000	27.300.000	70,09%
3	Persentase Pemerintah Desa yang Menggunakan Teknologi Informasi dalam Pemberian Pelayanan	Program Pembinaan dan Pelayanan Pemerintahan Desa	217.125.000	174.569.500	80,40%
Jumlah			1.916.932.000	1.633.698.867	85,22%

Realisasi keuangan pelaksanaan program-program yang menunjang pencapaian kinerja sebagaimana ditampilkan dalam tabel di atas sebesar 85,22 %. Hal ini karena adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Namun dari sisi pencapaian target kinerja melebihi target yang ditetapkan.

3.3 Prestasi yang Pernah diraih

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki tugas utama memberdayakan Pemerintah Desa dan memberdayakan masyarakat. Maka keberhasilan Dinas PMD dapat dilihat dari keberhasilan Pemerintah Desa maupun masyarakat yang menjadi binaan. Adapun prestasi yang dicapai pada tahun anggaran 2019, yaitu :

a. Juara II Lomba Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan

Untuk mengukur perkembangan Desa dari sisi penyelenggaraan Pemerintah Desa dilaksanakan Evaluasi Perkembangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi perkembangan Desa. Dalam rangka mendorong semangat peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa maka dilaksanakan Lomba Desa secara berjenjang mulai Lomba Desa tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat nasional. Pada pelaksanaan lomba Desa tahun 2019 Tingkat Provinsi Kalsel yang diwakili oleh Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan, yang dilaksanakan penilaian bulan Mei 2019 dan Desa Gambah Luar Muka memperoleh Juara Terbaik ke II Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Juara III Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018.

sedangkan untuk Lomba Kelurahan diwakili oleh Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan dan memperoleh Juara Terbaik III Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dalam rangka mencapai target indikator kinerja utama, maka dan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Capaian Indikator Kinerja Utama secara umum telah mencapai target yang telah ditetapkan, dengan realisasi yaitu :
 - 1). Nilai/Predikat AKIP belum dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - 2). Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan hasil pengukuran sebesar 0,6511 atau mencapai 102,10% dari target yang telah ditetapkan.
 - 3). Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terdapat 12 Desa yang sudah memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat atau 9,03 % dari jumlah desa se Kabupaten Hulu Sungai Selatan, mak capaian kinerja mencapai 108,04 % dari target yang ditetapkan.
- b. Langkah-langkah ke depan dalam rangka mencapai target kinerja antara lain :
 - 1). Mendorong PPTK untuk mempercepat realisasi pelaksanaan kegiatan.
 - 2). Meningkatkan koordinasi dengan Dinas-Dinas terkait yang secara tidak langsung memiliki tugas pokok dan fungsi yang dapat meningkatkan nilai IDM.

Demikian laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 ini disusun sebagaimana mestinya.

Kandangan, 31 Januari 2020

Kepala Dinas,



Drs. KAMIDI, MIP
Pembina Tingkat I

NIP. 19731115 199302 1 002

